

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
2. Bemmelen, R.W. Van., 1949. The Geology of Indonesia, Vol. 1 A, Government Printing Office, The Hague.
3. BP Statistic Review of World Energy. 2019. Statistical Review of World Energy 2019 67th reviews. United States.
4. Duwih, Alberd. 2016. Kajian Neraca Sumberdaya Mineral di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. UPN "Veteran" Yogyakarta.
5. Fitriansyah, Gusti. 2005. Analisis Neraca Batubara di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. UPN "Veteran" Yogyakarta.
6. Gautama, Gregorius. 2018. Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan di Jawa Tengah. UPN "Veteran" Yogyakarta.
7. Gobel, Alieftiyani. 2016. Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak dan Investasi. UPN "Veteran" Yogyakarta.
8. Haryadi, Harta. 2018. Analisis Perkiraan Kebutuhan Batubara Untuk Industri Domestik Tahun 2020-2035 Dalam Mendukung Kebijakan Domestic Market Obligation Batubara. Bandung.
9. Hermawan, Iwan. 2018. Pencabutan Domestic Market Obligation Batubara. Jakarta.
10. Saleh, Ridwan. 2012. Kebijakan Domestic Market Obligation Batubara dan Strategi Pengimplementasiannya. Bandung.
11. Sembiring, Yeremia. 2018. Evaluasi Potensi Sumberdaya Serta Analisis Neraca Mineral Non Logam Dan Batuan Di Provinsi Jawa tengah. UPN "Veteran" Yogyakarta.
12. Sikumbang dan Heryanto, 2009. Peta geologi lembar Banjarmasin skala 1:250.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung.
13. Rencana Umum Mineral dan Batubara ESDM Kalimantan Selatan, 2018.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
16. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan batubara.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.

20. Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Batubara.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 –2035.
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi.
24. SNI 19-6728.4-2015, Penyusunan Neraca Sumber Daya, 2015.
25. SNI 6728.4:2015, Penyusunan Neraca Spasial Sumberdaya Alam Bagian-4: Sumberdaya dan Cadangan Mineral dan Batubara, 2015.
26. SNI 5015-2011, Pedoman Pelaporan Sumberdaya dan Cadangan Batubara, 2015
27. Undang-undang No 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
29. Undang-undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral Dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri.
30. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah